

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanitijo, Ronny. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid I*. Jakarta: Djambatan.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur, Sri Susanti. 2010. *Urgensi Bank Tanah*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Parlindungan, A.P. 2008. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria (Cetakan Kesembilan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Rokhim Dahuri dan Jacob Rais. 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Santoso, Urip. 2005. *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

B. Internet, Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- <http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-sampang-2013.pdf>, diakses pada tanggal 22 Februari 2018 pukul 16.57 WIB.

<http://digilib.itb.ac.id/files/disk1/621/jbptitbpp-gdl-fuadadrian-31041-3-2008ta-2.pdf>, diakses pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 14.45 WIB.

<https://kbbi.web.id/reklamasi>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018 pukul 18.37 WIB.

<https://sampangkab.go.id/gambaran-umum/>, diakses pada tanggal 22 Februari 2018 pukul 20.29 WIB.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/32310/Chapter%20II.pdf;jsessionid=5E3D7899F8BC7ED2EA5C8F708783DE8A?sequence=4>, diakses pada tanggal 7 Desember 2017 pukul 21.05 WIB.

<https://sampangkab.bps.go.id/statictable/2015/03/24/116/-luas-wilayah-menurut-kecamatan-di-kabupaten-sampang-2013-.html>, diakses pada tanggal 22 Februari 2018 pukul 16.57 WIB.

<https://www.jawapos.com/radarmadura/read/2017/11/23/28934/reklamasi-pantai-kian-ramai-dlh-tak-berkutik>, diakses pada tanggal 4 Februari 2018 pukul 10.15 WIB.

http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kab.sampan/g/BAB%20II%20FINAL_SAMPANG.pdf, diakses pada tanggal 22 Februari 2018 pukul 21.27 WIB.

Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2017,
https://www.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Statistik-Indonesia-2017.pdf, diakses pada tanggal 5 Desember 2017 pukul 14.25 WIB.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur, *Sampang Galakkan Penanaman Bakau*,
<http://bappeda.jatimprov.go.id/2012/10/01/sampang-galakkan-penanaman-bakau/>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2017 pukul 16.05 WIB.

Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang, *Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai*,
http://www.bkprn.org/peraturan/the_file/permen40.pdf, diakses pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 09.55 WIB.

Hati, Putri Sari. 2017. *Kajian Dampak Reklamasi Pantai terhadap Ekosistem Mangrove dan Keterkaitannya dengan Tipologi Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Pesisir Selatan Kabupaten Sampang*,
<http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&id=110017&fyp=p>

otongan&potongan=S2-2017-372618-introduction.pdf, diakses pada tanggal 21 Oktober 2017 pukul 16.40 WIB.

Kusumawati, Tiara. 2010. *Tinjauan Yuridis Pembatasan Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa (Studi Kasus Terhadap Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A1975)*. Semarang : Skripsi Undip.

MSK, Indah Maulidiyah. 2016. *Perizinan Reklamasi Pantai Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Bandarlampung*, <http://digilib.unila.ac.id/25086/3/TESIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 07.14 WIB.

Muhsoni, Firman Farid. 2014. *Pemetaan Kerusakan Mangrove Di Madura Dengan Memanfaatkan Citra Dari Google Earth Dan Citra LDCM*, <http://msp.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2017/07/2014.PEMETAAN-KERUSAKAN-MANGROVE-DI-MADURA-DENGAN-MEMANFAATKAN-CITRA-DARI-GOOGLE-EARTH-DAN-CITRA-LDCM-Firman-Farid-Muhsoni.pdf>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2017 pukul 15.42 WIB.

Pawitro, Udjianto. 2015. *Reklamasi Kawasan Pesisir Pantai: antara Pelestarian Lingkungan dan Ekonomi Kawasan*, <http://temuilmiah.iplbi.or.id/wp-content/uploads/2015/11/TI2015-B-147-154-Reklamasi-Kawasan-Pesisir-Pantai-antara-Pelestarian-Lingkungan-dan-Ekonomi-Kawasan.pdf>, diakses pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 07.05 WIB.

Prasasi, Cindy Ayu. 2016. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis*. Semarang : Skripsi Undip.

Radar Madura, 23 September 2017.

Radar Madura, 27 September 2017.

Radar Madura, 9 Oktober 2017.

Radar Madura, 21 Oktober 2017.

Radar Madura, 27 Januari 2018.

Tody Sasmitha dan Haryo Budiawan. 2014. *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012; Putusan MK No.50/PUUX/ 2012; dan Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010)*, <http://pppm.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2015/02/Pemaknaan-Hak-Menguasai-Negara.pdf>, diakses pada tanggal 22 Desember 2017 pukul 08.13 WIB.

Yurista, Ananda Prima. 2016. *Implikasi Penafsiran Kembali Hak Menguasai Negara Terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*. <http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%204%20JRV%205.3%20WATERMARK.pdf>, diakses pada tanggal 1 Februari 2018 pukul 21.21 WIB.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Kelautan Dan Perikanan Nomor 17/ PERMEN-KP/2013 Tentang
Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Surat Edaran Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 410-1293 Tahun 1996 tentang Penertiban Status Tanah
Timbul Dan Tanah Reklamasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor: 7 Tahun 2012 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-
2032.